

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2020). *Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekeretariat Daerah Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Aldrian, M. R. (2017). *Pengaruh E-Purchasing terhadap Transparansi, Akses Pasar, dan Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Arfanti, M. A. (2014). *Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arianto, A. Y. (2013). *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Bruno, G. (2005). Analysis of Public e-Procurement. *Journal of Public Procurement*, 5.
- Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. (2020). *Panduan Tugas Akhir 2020*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dooley, & Ken Purchase, S. (2006). Factors Influencing E-Procurement Usage. *Journal of Public Procurement*, 6.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardanti, A. (2018). Diambil kembali dari <http://eprints.ums.ac.id/63285/12/BAB%20III-3.pdf>
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). (2022, Desember 25). *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*. Diambil kembali dari [lpse.lkpp.go.id: https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=LKPP%20merupakan%20lembaga%20pemerintah%20satu,Menteri%20Negara%20Perencanaan%20Pembangunan%20Nasional](https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=LKPP%20merupakan%20lembaga%20pemerintah%20satu,Menteri%20Negara%20Perencanaan%20Pembangunan%20Nasional).
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2018). Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-Catalogue pada Proses Pengadaan Proyek Konstruksi Jalan dengan Metoda SPSS & RII. *Rekayasa Sipil*, 90-105.
- Moon, M. (2005). E-Procurement Management In State Governments: Diffusion Of E-Procurement. *Journal of Public Procurement*, 5 (54).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.

- Reddick, C. (2004). The Growth Of E-Procurement In American State Governments: A Model And Empirical Evidence. *Journal of Public Procurement*, 4 (2).
- Rizky N., G. A. (2015). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem E-Purchasing*. Jember: Universitas Jember.
- Rofikoh, N., & Noor, A. M. (2013). Mewujudkan Good Governance melalui E-Procurement. *Jiana Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 12 No. 3 Juli 2013*, 155-166.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutriatmoko, d. (2015). Analisis Penerapan E-Procurement Obat dengan Prosedur E-Purchasing Berdasar E-Catalogue di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 275-282.
- Udoyono, K. (2012). E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 3 No. 1*, 135-171.
- Vaidya, K., Sajeev, A., & Callender, G. (2006). Critical Factors that Influence E-Procurement Implementation Success in the Public Sector. *Journal of Public Procurement*, 70-99.
- Wahyuni, S. (2020). *Implementasi E-Procurement Barang dan Jasa di Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wibawa, H. T. (2011). *Analisis Terhadap Kesiapan Implementasi E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo*. Sukoharjo: Universitas Sebelas Maret.